

**KEBIJAKAN ALTERNATIF PENGEMBANGAN PARIWISATA
POTENSIAL DI KOTA BONTANG*****ANALYSIS OF ALTERNATIF POLICY FOR POTENTIAL TOURISM
DEVELOPMENT IN BONTANG CITY*****A.M. Azhar Aljurida¹**Universitas Indonesia
Timur Makassar,
Indonesia¹

email:

azharaljurida51@gmail.com**A. Jusriadi²**Institut Teknologi dan
Kesehatan Tritunas
Nasional, Indonesia²

email:

andiyusriadijstar@gmail.com

Abstrak: Pariwisata merupakan “*the leading sektor*” dalam agenda pembangunan nasional. Implikasinya, sektor pariwisata oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus untuk dipacu pembangunannya, dan secara paralel pembangunan di sektor-sektor lain juga diarahkan dalam berupaya mendukung pembangunan di sektor pariwisata tersebut secara sinergis. Momentum ini kemudian penting untuk digunakan oleh setiap pemerintah daerah yang ada dalam berupaya mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata di daerahnya masing-masing hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang dalam mengembangkan sektor pariwisata potensial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi eksisting sektor pariwisata yang sedang dikembangkan di Kota Bontang saat ini dan upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan alternatif pada sektor pariwisata potensial di Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, telaah dokumen dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pariwisata Kota Bontang saat ini didominasi oleh kegiatan wisata bahari, dengan kondisi geografis yang berada di pesisir pantai, selain itu wisata budaya pun menjadi salah satu daya tarik wisata yang khas, dalam rencana induk pariwisata Kota Bontang Tahun 2019 dijelaskan ditetapkan bahwa obyek pariwisata potensial Kota Bontang adalah, Pulau Beras Basah, Kampung Wisata Adat Guntung, Obyek Wisata Bontang Kuala, Bontang Mangrove Park dan Lembah Permai Adventure Park. Kelima obyek wisata ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pengembangan prioritas. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bontang dalam mengembangkan sektor Pariwisata diawali dengan pembagian dan penetapan kawasan pariwisata melalui rancangan tata ruang wilayah, yang dimulai dari Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat kota.

Kata Kunci : Kebijakan Alternatif, Pariwisata, Sektor Potensial.

Abstract: Tourism is “*the leading sektor*” in the national development agenda. The implication is that the tourism sektor is given special attention by the central government to stimulate its development, and in parallel, development in other sektors is also directed towards efforts to support development in the tourism sektor in a synergistic manner. This momentum is then important for each regional government to use in trying to optimize the development of the tourism sektor in their respective regions. This is what the Bontang City government is paying attention to in developing the potential tourism sektor. This research aims to analyze and describe the existing conditions of the tourism sektor currently being developed in Bontang City and the government's efforts to develop alternatif policies in the potential tourism sektor in Bontang City. This research uses qualitative research methods, with a case study approach. Data collection through interviews, observation, document review and data analysis using data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results of this research found that Bontang City tourism is currently dominated by marine tourism activities, with geographical conditions located on the coast, apart from that cultural tourism is also one of the typical tourist attractions. In the 2019 Bontang City tourism master plan it is explained that Potential tourism objects in Bontang City are Beras Basah Island, Guntung Traditional Tourism Village, Bontang Kuala Tourism Object, Bontang Mangrove Park and Lembah Permai Adventure Park. These five tourist attractions have been designated by the government as priority development areas. This research also found that the Bontang City government's policy in developing the Tourism sektor begins with the division and determination of tourism areas through regional spatial planning, starting from the National Spatial Plan (RTRN), Provincial Spatial Plan (RTRWP) and Regional Spatial Plan at the city level.

Keywords: Alternatif Policy, Tourism, Potential Sektor

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol.4, No.1, pp. 32-38

Nopember 2023

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor prioritas yang ada dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan bahwa pariwisata merupakan “*the leading sektor*” dalam agenda pembangunan nasional.

Implikasinya, sektor pariwisata oleh pemerintah pusat diberi perhatian khusus untuk dipacu pembangunannya, dan secara paralel pembangunan di sektor-sektor lain juga diarahkan dalam berupaya mendukung pembangunan di sektor pariwisata tersebut secara sinergis. Momentum ini kemudian penting untuk digunakan oleh setiap pemerintah daerah yang ada dalam berupaya mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata di daerahnya masing-masing.

Pentingnya pembangunan kepariwisataan diakui karena memiliki setidaknya empat alasan. *Pertama*, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling mudah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dimana biaya investasi yang dibutuhkan dalam penciptaan lapangan kerja pada sektor ini dianggap lebih rendah dibanding sektor lainnya. *Kedua*, dari sisi keterkaitan antar sektor, sektor pariwisata merupakan penghubung dari banyak sektor, sehingga pengembangan sektor ini secara strategis akan mendorong pengembangan sektor-sektor lain yang ada. *Ketiga*, sektor pariwisata merupakan sektor yang menghasilkan nilai tambah yang besar. Selain itu, *keempat*, sektor pariwisata secara riil menghasilkan devisa bagi negara.

Sejumlah alasan ini kemudian menjadi pendorong bagi pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah untuk mulai berfokus dalam upaya pembangunan sektor pariwisata secara kolektif di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan untuk menggenjot pendapatan daerah tidak hanya melalui sektor sumber daya alam namun, justru harus lebih mengoptimalkan sektor pariwisata.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Koen Meyers (Anggriani, 2019), pariwisata yaitu aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke tempat tujuan dengan alasan bukan untuk mencari nafkah ataupun menetap, namun hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang serta tujuan-tujuan lainnya.

Salah satu sektor pariwisata yang ada di Indonesia terutama di Kalimantan Timur yaitu terdapat di Kota Bontang. Menurut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang atau disebut Dispopar Kota Bontang Tahun 2023, Kota Bontang memiliki daya tarik dan potensi dalam hal pariwisata salah satunya adalah Pulau Beras Basah, yang mana kawasan wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri. dan kebanyakan daya tarik wisata alam seperti Pulau Beras Basah (Dispopar, 2021).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang Tahun 2021, kawasan wisata beras basah setiap tahunnya akan mengalami peningkatan jumlah wisatawan atau pengunjung, terlebih lagi pada saat hari – hari liburan maka jumlah pengunjung perharinya dapat meningkat dari jumlah 450 orang di tahun 2018 sampai kurang lebih 5000 pengunjung di tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah pengunjung. Kawasan wisata Pulau Beras Basah umumnya memiliki daya tarik dan potensi yang besar sehingga dapat diprediksi terjadinya peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya.

Daya Tarik tersebut berupa kawasan pesisir yang indah dan fasilitas yang ada walaupun tidak semua fasilitas sarana dan

prasarana terjangkau. Pariwisata berkelanjutan menurut *Federation of Nature and National Parks* (Arida, 2017) menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan segala bentuk pembangunan, pengelolaan, dan aktivitas pariwisata harus memperhatikan integritas lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dari sumber daya alam 4 dan budaya yang ada untuk jangka waktu yang lama. Dari adanya pengertian mengenai pariwisata berkelanjutan yang mementingkan pengembangan pariwisata dengan konsep yang berkelanjutan dengan memadukan antara keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang tanpa membahayakan kondisi lingkungan.

Dari adanya pengertian mengenai pariwisata berkelanjutan yang mementingkan pengembangan pariwisata dengan konsep yang berkelanjutan dengan memadukan antara keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang tanpa membahayakan kondisi lingkungan. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan perlu adanya pencapaian pengembangan tanpa adanya penipisan sumber daya yang dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang memperhatikan ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang.

Kemudian berdasarkan dari permasalahan dan juga potensi yang dimiliki pulau beras basah, maka perlu adanya pembangunan wisata beras basah yang berkelanjutan dengan pengembangan wisata melalui pendekatan *sustainable tourism*. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pariwisata dengan konsep pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* yang dapat memaksimalkan potensi wisata yang ada dan dapat membantu masyarakat lokal dengan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta pihak lainnya dalam mengembangkan kawasan wisata beras basah kedepannya dan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan melihat isu-isu pengembangan wisata

Beras Basah di Kota Bontang sehingga pengembangan kawasan wisata tetap menjadi salah satu sumber daya pariwisata alam yang dapat menciptakan keberlanjutan dari segi lingkungan, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Kajian ini diperlukan untuk melihat dan menganalisis kebijakan alternatif yang digunakan dalam pengembangan sektor pariwisata potensial di Kota Bontang. Saat ini pemerintah Kota Bontang sedang mempersiapkan diri untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah melalui substitusi eksplorasi sumber daya alam menuju sektor pariwisata strategis.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan Studi Kasus (*case study*), penelitian bermaksud memusatkan perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail (Sugiono, 2008). Sehingga secara spesifik diharapkan dapat menemukan alternatif kebijakan yang relevan untuk mengembangkan sektor pariwisata potensial di Kota Bontang.

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Moleong (2000) menyebutnya dengan *teknik purposivel sampling*, yaitu memilih sumber yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti.

Pihak yang dipilih menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah mereka atau pihak yang dipandang mengetahui dan bahkan mengalami peristiwa yang menjadi obyek penelitian diantaranya Representase Dispopar Kota Bontang, Pokja Pariwisata, Masata (Masyarakat Sadar Wisata), dan Wisatawan dan Perwakilan pengusaha pada sektor pariwisata.

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Pariwisata Kota Bontang Berdasarkan Sistem Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diatas, dalam Sistem Perkotaan Nasional Kota Bontang, salah satu kota yang termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) selain Balikpapan, Tenggarong dan Samarinda, artinya Kota Bontang sebagai kawasan kota yang direkomendasikan sebagai simpul utama kegiatan ekspor dan impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan diketahui bahwa Kota Bontang sebagai salah kawasan andalan tingkat nasional maupun provinsi meliputi; kawasan Bontang-Samarinda-Tenggarong, Balikpapan, Penajam paser utara dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata, adapun sektor unggulan kota Bontang adalah; Perikanan dan Pariwisata.

Keterkaitan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dijabarkan dalam paradigma pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur yang menekankan pada konsep; Pembangunan pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*), Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab (*Responsible Marketing*), Pariwisata dan Ekonomi Hijau (*Green Economy and Tourism*). Pembangunan Kepariwisata Berbasis Tata Kelola yang baik (*Good Tourism Governance*) dan Keterpaduan Kepariwisata.

Hasil penelitian juga menunjukkan Wilayah Kota Bontang, termasuk dalam kawasan pengembangan Pariwisata (KPP) di Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam KPP 1 meliputi; kawasan Perkotaan (Kota

Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang). Daya tarik Pariwisata KPP 1 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu; daya tarik wisata berbasis alam, daya tarik wisata berbasis wisata sejarah dan budaya, serta daya tarik wisata berbasis.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa paradigma pembangunan kepariwisataan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, didasarkan pada pola pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memberi dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat yang telah menjadi agenda global dalam proses pembangunan kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini diperkuat dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, yaitu (a) berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*), (b) diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*), (c) layak secara ekonomi (*economically viable*), (d) memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*).

Berdasarkan analisis peneliti, dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kota Bontang sudah menyusun strategi dalam pengembangan wisata. Strategi yang sudah disusun tersebut tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Dispopar Kota Bontang Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan strategis dalam kebijakan pengembangan pariwisata Kota Bontang menjadi langkah awal yang ditempuh pemerintah Kota Bontang untuk mempersiapkan dirinya menjadi Kota Destinasi Wisata, Kebijakan alternatif melalui penataan kawasan wisata dilakukan pemerintah Kota Bontang dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Model perencanaan kota seperti ini sering digunakan sebagai model perencanaan sektor pariwisata, hal ini sejalan dengan gagasan Gunn & Morrison mencatat model ini

digunakan oleh negara Irlandia dan Prancis lebih dari 50 tahun yang lalu, Perencanaan pariwisata kemudian berkembang pula ke negara-negara lain, seperti yang dilakukan Hawaii (1959) serta Sri Lanka, Malaysia, dan Bali antara tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Modelnya tidak lagi terbatas pada perencanaan sektoral, tetapi lebih bersifat komprehensif berkenaan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, yang diturunkan kedalam dokumen kebijakan yang bersifat operasional dan kejelasan hukum serta memiliki nilai keberlanjutan.

Melalui kebijakan perencanaan sektoral kewilayahan pariwisata melalui pengaturan penataan ruang di Kota Bontang, merupakan bentuk nyata dari kebijakan alternatif yang ditempuh untuk memberikan regulasi dan pengaturan terhadap pengembangan pariwisata potensial yang ada di Kota Bontang. Regulasi yang berjenjang mulai dari tingkat nasional, regional ditindak lanjuti dengan membentuk regulasi di tingkat lokal untuk menciptakan sinergi regulasi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Unggulan di Kota Bontang

Jika dilihat berdasarkan data tingkat kunjungan wisatawan nusantara ke Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada semester 1 tahun 2018, kunjungan wisatawan nusantara sebesar 2.084.834 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada semester 1 tahun 2018 sebesar 20.991 orang. Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisatawan nusantara pada semester 1 tahun 2018 adalah Kota Balikpapan sebanyak 1.315.139 orang atau 63,08 % tingkat kunjungan. Selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 322.337 orang atau 15,46 % dan Kota Bontang sebanyak 118.216 orang atau 5,67 %.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa empat wilayah yang tersaji wilayah Kota Balikpapan menjadi tujuan destinasi wisata nasional tertinggi dengan jumlah kunjungan ditahun 2018 mencapai 1.315.139 orang, sementara yang terendah adalah Kota Bontang dengan jumlah kunjungan 118.216 orang pada tahun 2018, artinya langkah pemerintah dalam mendorong sektor wisata di Kota Bontang dalam empat tahun terakhir belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bontang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun tidak berada pada posisi tertinggi kunjungan wisatawan di provinsi Kalimantan Timur, namun pemerintah Kota Bontang menilai hal tersebut bukan merupakan kegagalan disebabkan adanya perbedaan daya dukung perkotaan sekitar yang memang menjadi penunjang utama wilayah tersebut menempati posisi kunjungan tertinggi seperti Samarinda dan Balikpapan. Namun demikian pemerintah Kota Bontang senantiasa menyusun langkah alternatif kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan daya saing wisata di Kota Bontang.

Dalam dokumen Review Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, terdapat daerah tujuan wisata unggulan dan penunjang yang ditetapkan untuk Kota Bontang sebagai salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Daerah Tujuan Wisata Unggulan, yaitu Mangrove Berbas Pantai dan Daerah Tujuan Wisata Penunjang: (a) Kehidupan Masyarakat di Bontang Kuala, (b) Pulau Beras Basah, (c) Taman Wisata Graha Mangrove.

Ketiga obyek wisata ini ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tujuan wisata unggulan dan penunjang, keindahan alam yang ditawarkan

obyek wisata tersebut bernilai estetika yang sangat tinggi olehnya itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dikembangkan pedoman tata ruang yang menunjang ekosistem pariwisata.

Berdasarkan kebijakan kawasan wisata Kota Bontang, wisata perkampungan nelayan pertama di Bontang berada di wilayah pesisir di antara ekosistem mangrove. Sebagai kawasan permukiman di atas air (laut), maka kawasan Bontang tidak lepas dari perannya sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya, dalam dokumen RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039, terdapat beberapa hal yang mengatur kawasan lindung dan budidaya serta kaitannya dengan pengembangan Pariwisata Kota Bontang.

Salah satu kebijakan strategis adalah menjamin keberlanjutan kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan Bontang masuk ke dalam kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar pesisir dan mangrove), yaitu (Pasal 41). Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 42), dan kawasan ekosistem mangrove (Pasal 43).

Sebagai kawasan budidaya, kawasan Bontang masuk sebagai kawasan perikanan budidaya (Pasal 49) dan kawasan peruntukan pariwisata (Pasal 51) berupa kawasan wisata alam yang berada di sekitar permukiman di atas air(laut) di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara. Kawasan peruntukan pariwisata sendiri menurut RTRW.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa poin penting yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang saat ini sebagai kebijakan strategis pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Sistem Jaringan Transportasi Darat, ditetapkan bahwa rencana jaringan jalan

kota termasuk di dalamnya adalah pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek wisata. Hal ini diperlukan agar objek wisata tersebut dapat memiliki akses yang baik, sehingga mudah untuk dikunjungi wisatawan.

- 2) Kawasan peruntukan pariwisata, dikatakan bahwa pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan peruntukan pariwisata harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung yang terdapat di sekitar kegiatan pariwisata.
- 3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota (Pasal 39) termasuk juga pada perwujudan kawasan budidaya (pariwisata).

Berdasarkan hasil analisis data sekunder, dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Rippar) Kota Bontang Tahun 2019 telah membagi kegiatan wisata dalam Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Kota Bontang menjadi 5 (lima) kawasan pengembangan pariwisata, yaitu Kawasan Pariwisata Alam, Kawasan Pariwisata Seni, Budaya dan Tinggalan Sejarah. Kawasan pariwisata religi, kawasan pariwisata buatan, Kawasan wisata belanja dan kuliner.

Program strategis lainnya adalah pembagian kawasan pengembangan pariwisata menurut kondisi secara geografis dan kegiatan wisata yang telah maju dan berkembang serta mendapatkan jumlah kunjungan yang paling banyak dari wisatawan di Kota Bontang menjadi pertimbangan dalam menyusun kawasan wisata yang akan dikembangkan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian Pengembangan pariwisata di Kota Bontang tidak memerlukan investasi besar karena mendayagunakan sumber daya yang ada, adanya dukungan geografis dan potensi alam serta budaya lokal masyarakat disekitar kawasan menjadi magnet pariwisata yang akhirnya dipilih oleh pemerintah untuk dikembangkan, selanjutnya Pariwisata juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai

kesejahteraan secara berkelanjutan baik dari sisi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang terlibat dalam usaha pariwisata.

KESIMPULAN

Pariwisata Kota Bontang saat ini didominasi oleh kegiatan wisata bahari, dengan kondisi geografis yang berada di pesisir pantai, selain itu wisata budaya pun menjadi salah satu daya tarik wisata yang khas, dalam rencana Induk Pariwisata Kota Bontang Tahun 2019 dijelaskan ditetapkan bahwa obyek pariwisata potensial Kota Bontang adalah, Pulau Beras Basa, Kampung Wisata Adat Guntung, Obyek Wisata Bontang Kuala, Bontang Mangrove Park dan Lembah Permai Adventure Park, Kelima obyek wisata ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pengembangan prioritas, karena tingkat kunjungan wisatawan setiap tahun terus meningkat dan juga telah memberi dampak pengembangan ekonomi masyarakat lokal di kawasan Wisata, selain itu telah memenuhi syarat sebagai pariwisata modern dan multisektor.

REFERENSI

- Arida, I. N. 2017. *Ekowisata (Pengembangan Partisipasi lokal dan Tantangan Ekowisata)*. Bali: Cakra Press.
- Anggraini, R. P., Sulistyowati, L. N., & Purwanto, H. (2019, September). Pengaruh Fasilitas, Harga Tiket Dan Daya Tarik Terhadap Keputusan Berkunjung Di Obyek Wisata Telaga Ngebel. *In Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Vol. 1)*.
- Agus, Erwan. P dan Ratih, Dyah. S. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ashoer, M. et al. 2021. *Ekonomi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Asparnas. 2021. *Asosiasi Pariwisata Nasional*, Jakarta.
- Atmoko, T. P. H. 2014. 'Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman', *Jurnal Media Wisata*, 12(2), Pp. 146–154.
- Bakaruddin. 2009. *Perkembangan Permasalahan Kepariwisataaan*. Padang: UNP Press.
- Deddy Prasetya Maha Rani. 2014. Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. *Tesis*
- Laili Ratnasari., 2013. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Lawang Sewu. *Skripsi*
- Mill Robert Christie and Morrison. 1985. *The Tourism System*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal ilmiah*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisataaan*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang *Organisasi Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata*.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*.